

**REPRESENTASI KONSEP BIBIT, BEBET, BOBOT
DALAM MEMILIH PASANGAN DAN KONFLIK STATUS SOSIAL
DALAM SERAT PRABANGKARA: KAJIAN ANTROPOLOGI KARIN BARBER**

**Representation of the Concepts of *Bibit, Bebet, Bobot*
in Choosing a Partner and Social Status Conflict
in Serat Prabangkara: An Anthropological Study by Karin Barber**

Sukmana Argo R.D^{a,*}, Suwardi Endraswara^{b,*}, Sri Harti Widyastuti^{c,*}

^{a,*b,*c,*} Universitas Negeri Yogyakarta
Jalan Colombo No. 1, Karangmalang, Yogyakarta, Indonesia
^{a,*} Pos-el: argosukmana@gmail.com

(Naskah Diterima Tanggal 21 Desember 2024—Direvisi Akhir Tanggal 5 Desember 2025—Disetujui Tanggal 30 Desember 2025)

Abstrak: Penelitian ini mengkaji Serat Prabangkara karya Ki Padmasusastra dengan menggunakan pendekatan antropologi sastra Karin Barber untuk melihat bagaimana teks berfungsi sebagai “tindakan sosial” dalam konteks pernikahan Jawa. Dengan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini menunjukkan bahwa teks tidak hanya menceritakan kisah, tetapi juga berperan aktif dalam mempertahankan batas-batas sosial. Ada tiga temuan utama: pertama, penolakan pernikahan dalam cerita digunakan untuk menegaskan batas antara bangsawan dan rakyat biasa; kedua, konsep bibit, bebet, bobot tidak hanya menjadi nasihat etis, tetapi juga dipakai sebagai alat politik untuk menjaga kemurnian keturunan dan mempertahankan kekuasaan; dan ketiga, teks menunjukkan adanya tarik-menarik antara keinginan pribadi tokoh dan aturan sosial, yang pada akhirnya membuat tokoh harus tunduk pada tatanan feodal. Dengan demikian, Serat Prabangkara berfungsi sebagai instrumen budaya yang menanamkan pentingnya menjaga harmoni dan hierarki sosial daripada memenuhi keinginan individu.

Kata kunci: Serat Prabangkara; antropologi sastra; Karin Barber

Abstract: This research examines Serat Prabangkara by Ki Padmasusastra using Karin Barber's literary anthropology approach to see how the text functions as a “social action” in the context of Javanese marriage. Using qualitative descriptive methods, this research found that texts not only tell stories, but also play an active role in maintaining social boundaries. There are three main findings. First, the rejection of marriage in the story is used to emphasize the boundaries between nobles and commoners. Second, the concept of seed, bebet, weight is not only an ethical advice, but is also used as a political tool to maintain the purity of offspring and maintain power. Third, the text shows that there is a tug-of-war between the character's personal desires and social rules, which ultimately forces the character to submit to the feudal order. Thus, Serat Prabangkara functions as a cultural instrument that instills the importance of maintaining social harmony and hierarchy rather than fulfilling individual desires.

Keywords: Serat Prabangkara; literary anthropology; Karin Barber

How to Cite: Argo, R.D.S., Endraswara, S., Widyastuti, S.H. (2025). Representasi Konsep Bibit, Bebet, Bobot dalam Memilih Pasangan dan Konflik Status Sosial dalam Serat Prabangkara: Kajian Antropologi Karin Barber. *Atavisme*, 28(1), 45-56 (doi: 10.24257/atavisme.v28i1.1064.45-56)

Permalink/DOI: <http://doi.org/10.24257/atavisme.v28i1.1064.45-56>

PENDAHULUAN

Serat Prabangkara (selanjutnya ditulis SP), karya monumental Ki Padmasusastra (1843—1926), menghadirkan sebuah karya menarik dalam khazanah sastra Jawa klasik. Tidak seperti naskah keraton yang umumnya berfungsi sebagai legitimasi kekuasaan semata, SP yang ditulis oleh seorang yang bukan merupakan pujangga keraton berhasil menyajikan konflik sosial fundamental yang setara dengan karya para pujangga besar lainnya (Wibowo, 2016). SP ini berbentuk karya sastra prosa berbahasa Jawa Krama yang diperindah dengan tembang macapat dalam penulisannya (Pamungkas, 2017).

Di dalam SP, tersimpan berbagai representasi budaya Jawa yang sarat akan ajaran moral dan pendidikan karakter yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari (Pamungkas, 2021). Teks ini secara mendalam memperlihatkan relasi kuasa serta tatanan sosial yang hidup dalam struktur masyarakat Jawa. Secara lebih luas, SP menggambarkan konflik batin dan nilai-nilai etika. Ki Padmasusastra, melalui narasinya, membangun sikap kritis terhadap kekuasaan, salah satunya dengan menampilkan keberanian tokoh untuk menolak kehendak ayahnya yang merupakan seorang Raja karena bertentangan dengan hati nurani dan ajaran agama (Wibowo, 2016).

Untuk memahami konflik dalam SP, perlu digali terlebih dahulu bahwa dalam konteks sosial budaya Jawa, pernikahan dipandang sebagai ikatan yang sakral, bukan sekadar hubungan romantis antar-individu. Menurut Gigih, Adha, & Suntoro (2021) pernikahan dalam konteks sosial budaya Jawa merupakan bagian dari pelestarian status dan harmoni sosial. Pada zaman kerajaan, konsep pernikahan pada zaman itu menggunakan sistem perjodohan. Sistem ini memegang peranan vital, yakni otoritas orang tua terutama dalam lingkup keraton menjadi mutlak dalam menentukan pasangan yang

dianggap setara (Khoiruddin, Syamsuddin, & Baehaqi, 2024).

Seperti halnya pepatah Jawa, dalam memilih pasangan harus melihat *bibit*, *bebet*, *bobot*. Dengan memperhatikan *bibit* 'asal-usul garis keturunan', *bebet* 'status sosial ekonomi', dan *bobot* 'kualitas diri' dalam memilih pasangan. Penilaian ini dilakukan oleh orang tua untuk memastikan kecocokan dan harmoni keluarga. Otoritas ini bertujuan membangun keluarga sakinah melalui ritual sistematis yang menjaga tatanan sosial (Aziz, 2017). Konsep *bibit*, *bebet*, *bobot* menjadi parameter mutlak yang harus dipenuhi untuk menjaga kemurnian trah dan stabilitas kekuasaan. Dalam mitos dan tradisi Jawa, perkawinan beda kasta atau etnis dipandang sebagai pelanggaran norma perjodohan yang dianggap mencoreng kehormatan keluarga dan mengancam tatanan hierarki sosial, sehingga kerap memicu konflik keluarga dan komunal serta mencerminkan ketegangan antara nilai tradisional dan dinamika modern (Uyun, 2023).

Tidak dapat dipungkiri bahwa nilai-nilai tradisional dalam pernikahan adat Jawa masih berpengaruh hingga kini, meskipun praktik perjodohan telah mengalami penyesuaian seiring modernisasi. Jika dahulu diterapkan secara ketat di lingkungan keraton untuk menjaga kehormatan dan tatanan sosial, kini sistem tersebut meluas ke masyarakat umum dengan pola yang lebih adaptif dan semi-modern. Hal ini sejalan dengan temuan Permatasari & Wijaya (2018) yang menunjukkan perubahan pola pikir orang tua, termasuk penyederhanaan prosesi dan fleksibilitas pelaksanaan pernikahan. Meski tidak lagi diberlakukan secara kaku, prinsip *bibit*, *bebet*, *bobot* tetap dianggap relevan dan masih memengaruhi cara pandang serta relasi sosial dalam pernikahan masa kini.

Naskah ini memiliki alur cerita yang sarat makna yang membenturkan norma

tradisional tersebut dengan hasrat pribadi. Satu bagian mengisahkan Raden Jaka Sungging Prabangkara, putra Raja Brawijaya dari Majapahit, yang mendapatkan tugas dari ayahnya untuk menggambar isi langit dan angkasa (Pamungkas, 2017). Namun, inti dari dinamika sosial dalam serat ini berfokus pada tema percintaan yang melibatkan tokoh-tokoh dari latar belakang sosial dan budaya yang berbeda. SP secara khusus mengisahkan Pangeran Prabangkara yang memilih meninggalkan kemewahan keraton untuk mengejar cintanya pada Rara Apyu, seorang putri juru taman dari kalangan rakyat jelata. Hubungan mereka tidak direstui oleh Prabu Andakara karena Prabangkara seharusnya mencari pendamping hidup yang setara (sama-sama memiliki garis keturunan bangsawan). Cerita ini mengungkapkan adanya dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat yang memandang bahwa pernikahan harus memiliki tingkat sosial yang setara. Dinamika sosial inilah yang akan disoroti dalam penelitian ini.

Kisah dalam SP tersebut bukan hanya cerita tentang cinta terlarang, melainkan juga mencerminkan ketegangan sosial yang nyata. Teks ini memperlihatkan pertentangan antara keinginan pribadi (cinta sang pangeran) dengan aturan sosial yang kaku, yang menuntut adanya pernikahan berdasarkan kesetaraan status demi menjaga tatanan hierarki. Keunikan SP terletak pada kemampuannya yang tidak hanya menggambarkan kehidupan sosial, tetapi juga menampilkan konflik yang muncul dari aturan tersebut. Karena itu, SP menjadi bahan kajian yang menarik untuk memahami bagaimana representasi budaya, praktik pernikahan, dan kelas sosial saling berhubungan dan dinegosiasikan dalam masyarakat Jawa.

Kekayaan naratif ini telah menarik minat beberapa peneliti sebelumnya. Wibowo (2016), misalnya, dalam kajiannya mengenai “Pandangan Multikultural Ki Padmasusastra Melalui Empat Karya Sastranya”. Hasil dari penelitian tersebut

adalah pandangan multikultural dari Ki Padmasusastra dalam menulis empat karya sastranya, yaitu Serat Rangsang Tuban, SP, Serat Kandha Bumi, dan Serat Kabar Angin. Pandangan ini menghasilkan bahwa keempat serat yang ditulisnya mengandung nilai-nilai untuk membangun karakter, tanpa menghilangkan nilai kearifan lokal yang sudah mendarah daging. Selanjutnya, Pamungkas (2017) melalui “Serat Prabangkara Karya Ki Padmasusastra Tinjauan Psikologi Sastra dan Nilai Pendidikan Karakter”. Penelitian ini menghasilkan analisis berupa psikologi karakter yang terdapat dalam Serat Prabangkara.

Namun, di sinilah tampak kelemahan penelitian sebelumnya. Kajian terdahulu cenderung memandang SP sebagai teks pasif yang hanya memuat nilai moral atau karakter, tanpa melihat perannya dalam kehidupan sosial. Akibatnya, penelitian lebih berfokus pada isi nilai daripada memahami bagaimana teks ini menggambarkan ritual, melegitimasi pernikahan politik, atau berperan dalam memperkuat maupun mengkritik tatanan sosial masyarakat Jawa.

Kebaruan penelitian ini terletak pada cara pandangnya terhadap SP yang tidak lagi dianggap sebagai cermin pasif, tetapi sebagai teks yang berperan aktif dalam dinamika sosial. Dengan menggunakan teori antropologi sastra Karin Barber (2007), penelitian ini melihat teks sebagai “tindakan sosial” yang bekerja melalui praktik penulisan dan pembacaannya. Melalui perspektif ini, penolakan Prabu Andakara terhadap Rara Apyu dipahami bukan sekadar peristiwa dalam cerita, melainkan sebagai bentuk tindakan teks untuk menegaskan batas-batas kelas sosial dalam masyarakat Jawa.

Berdasarkan celah penelitian dan urgensi untuk memahami teks sebagai agen aktif, rumusan masalah dalam penelitian ini tidak hanya menanyakan representasi umum, tetapi juga menelisik aspek performatif teks secara spesifik. Masalah yang dikaji dirumuskan sebagai berikut. (1) bagaimanakah penolakan pernikahan dalam

Serat Prabangkara menunjukkan perbedaan kelas? (2) bagaimanakah konsep bibit, bebet, bobot dihadirkan dalam dinamika sosial pernikahan keraton dalam teks? (3) bagaimanakah teks ini menunjukkan konflik antara keinginan tokoh dan aturan sosial?

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konflik sosial dan politik pernikahan yang terkandung dalam SP menggunakan tinjauan antropologi sastra Karin Barber. Kajian terhadap SP melalui pendekatan Karin Barber menunjukkan pengungkapan peran teks ini dalam proses interaksi sosial. Tidak hanya sebagai refleksi, teks ini juga berfungsi sebagai agen perubahan sosial yang mampu memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap identitas mereka sendiri. Hal ini sejalan dengan pandangan Barber bahwa teks-teks sastra dapat menjadi cermin sekaligus motor penggerak bagi dinamika sosial.

Penelitian ini diharapkan memberi dua manfaat. Secara teoretis, penelitian ini menerapkan teori antropologi Karin Barber pada sastra Jawa sebagai alternatif dari pendekatan filologi atau strukturalisme yang selama ini dominan. Secara praktis, penelitian ini memberikan pemahaman baru tentang bagaimana karya sastra masa lalu berperan aktif dalam membentuk dan mempertahankan struktur sosial, termasuk pandangan tentang kelas dan kekuasaan, yang masih relevan dengan kondisi masyarakat saat ini.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan antropologi sastra dari perspektif Karin Barber (2007). Pendekatan ini relevan untuk memahami dimensi budaya dalam SP. Dalam bukunya, *The Anthropology of Text: Person and Public*, Barber menjelaskan bahwa teks sastra tidak hanya berfungsi sebagai karya estetis, tetapi juga sebagai medium interaksi sosial yang merefleksikan hubungan kompleks antara individu dan masyarakat.

Pendekatan ini menekankan pentingnya menganalisis konteks produksi, penyebaran, dan penerimaan teks sebagai bagian integral dari kehidupan sosial untuk mengungkap makna yang lebih mendalam, alih-alih hanya memandang teks sebagai cermin pasif realitas.

Melalui penerapan pendekatan ini, SP tidak lagi dilihat hanya sebagai karya sastra statis, melainkan sebagai artefak budaya yang aktif. Teks ini dipahami sebagai arena yang mencerminkan pola komunikasi, sistem nilai, dan dinamika kekuasaan yang beroperasi dalam masyarakat Jawa. Dinamika sosial yang tecermin di dalamnya mencakup isu-isu sosial, gender, dan politik kekuasaan. Lebih jauh lagi, adanya indikasi resistensi budaya terhadap norma-norma yang mapan dalam alur cerita menunjukkan kompleksitas masyarakat Jawa dalam merespons dan menegosiasikan tatanan sosial pada masanya.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diambil dari SP pada laman <https://www.sastra.org/> yang diakses pada tanggal 20 Juni 2025, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari artikel, jurnal, buku, maupun literatur yang berhubungan dengan antropologi sastra dan SP.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi pustaka serta teknik baca, simak, dan catat secara mendalam. Setelah itu, data diklasifikasikan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan analisis penelitian. Instrumen kunci dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (*human instrument*), yang dibantu oleh lembar kodifikasi data untuk mengklasifikasikan unit-unit tekstual (dialog, narasi, deskripsi) yang relevan dengan tiga fokus penelitian: representasi ritual dan tradisi, pernikahan politik, dan dinamika sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian dan menjabarkan pembahasan dari hasil temuan tersebut. Hasil penelitian ini

menemukan beberapa poin berdasarkan analisis mendalam sesuai dengan konsep antropo-logi sastra dari Karin Barber. Hasil dari penelitian tersebut adalah (1) penolakan pernikahan sebagai tindakan sosial yang menunjukkan perbedaan kelas, (2) konsep bibit, bebet, bobot dalam dinamika sosial pernikahan, serta (3) penggambaran konflik antara keinginan tokoh dan aturan sosial

Penolakan Pernikahan karena Perbedaan Kelas Sosial

Salah satu tradisi yang terdapat dalam serat tersebut adalah tradisi pernikahan. Dalam hal ini, tradisi pernikahan yang disebutkan adalah pernikahan Jawa. Pernikahan adalah ikatan yang meresmikan hubungan cinta kasih, baik di mata Tuhan maupun di hadapan masyarakat (Ajrin, 2017). Pernikahan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, memberikan ketetapan bahwa pernikahan sebagai ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membangun keluarga atau rumah tangga yang harmonis dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan isi undang-undang perkawinan tersebut, terlihat jelas bahwa tujuan umum dari pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia, yang dijalankan oleh pasangan suami istri.

Dalam tradisi Jawa, pernikahan merupakan fase sakral yang terjadi dalam kehidupan manusia. Fase-fase kehidupan yang akan dilalui manusia sudah tertulis jelas dari leluhur-leluhur Jawa pada zaman dahulu, yang digambarkan dalam tembang macapat. Prabawa (2022) menyebutkan bahwa setiap urutan tembang macapat menginterpretasikan urutan fase kehidupan manusia, mulai dari maskumambang (janin yang terdapat dalam kandungan), mijil (lahir), sinon (masa muda), kinanti (membutuhkan tuntunan atau bimbingan), asmaradana (mulai timbul perasaan cinta kepada lawan jenis), gambuh (menikah), dandanggula (pernikahan yang bahagia), durma

(mempersiapkan bekal menuju akhirat), pangkur (menghindari hawa nafsu negatif), megatruh (meninggal), dan pocung (jasadnya dikafani). Dalam urutan macapat tersebut, dapat diketahui bahwa fase kehidupan manusia ketika menginjak pada fase pernikahan digambarkan dalam tembang macapat gambuh.

SP menceritakan tentang perjuangan seorang Prabangkara yang ingin menikah dengan pujaan hatinya bernama Rara Apyu, dapat terwujud meskipun melewati rintangan yang amat rumit. Keberhasilan perjuangan mereka hingga sampai dalam fase pernikahan dapat ditemukan pada kutipan serat di bawah ini.

“....., jinajaran pangeran kalih sisih sarta ginarêbêg para pangeran kathah, tindakipun sang pangeran pangantèn langak-langak kados lanyapan wontên kêlir, sarira kados prada binabar dhasar panggalih botên kêndhak, adamêl kasmaranipun ingkang sami ningali, rawuh samadyaning pandhapa, wali Sang Prabu Āndapawaka sampun kadhawuhan majêng lajêng ijab” (SP/90-91)

“....., kedua mempelai diantar oleh dua orang pangeran, sang pangeran seperti mencari dibalik kelambu, mempelai pria pangeran berjalan berkeliling seolah-olah ada cahaya, badan seolah-olah landasan pikiran tidak ada. Membuat jatuh cinta yang melihat, datang ke pendapa wali Prabu Āndapawaka telah diperintahkan untuk maju kemudian melakukan ijab qabul” (SP/90-91)

Dari kutipan tersebut, dapat diketahui bahwa SP merepresentasikan ritual dan tradisi pernikahan dalam budaya Jawa yang sarat dengan simbolisme dan makna sosial. Upacara pernikahan digambarkan sebagai peristiwa agung yang melibatkan raja, pangeran, panglima, serta tokoh agama, yang menegaskan bahwa pernikahan berfungsi sebagai simbol legitimasi kekuasaan dan harmoni sosial. Dalam perspektif antropologi sastra Karin Barber, teks ini tidak hanya mencatat peristiwa, tetapi juga merekam

bagaimana sastra berperan sebagai sarana interaksi sosial yang meneguhkan nilai adat, agama, dan hierarki. Simbolisasi mempelai pria yang “bercahaya” mencerminkan status tinggi dan perannya sebagai pewaris tradisi sehingga teks ini berfungsi tidak hanya sebagai karya sastra, tetapi juga sebagai representasi sistem budaya dan struktur kekuasaan masyarakat Jawa.

Dalam Serat Prabangkara, kisah pernikahan tidak hanya dihadirkan sebagai rangkaian prosesi adat yang sakral, tetapi juga sebagai ruang yang memperlihatkan ketegangan sosial di baliknya. Cerita cinta Prabangkara dan Rara Apyu, misalnya, tidak berjalan mulus karena harus berhadapan dengan aturan sosial yang ketat dalam lingkungan keraton. Meskipun mereka saling mencintai, hubungan tersebut sempat mengalami penolakan lantaran perbedaan kelas yang memisahkan keduanya. Prabangkara berasal dari kalangan bangsawan, sedangkan Rara Apyu adalah rakyat biasa. Penolakan ini menggambarkan bagaimana hierarki sosial dalam keraton masih menentukan siapa yang layak menjadi pasangan seorang bangsawan. Hal tersebut tampak jelas dalam kutipan berikut.

“Apa durung sira surupake yèn putraning ratu ora kêna krama olèh wong cilik, kudu olèh putrining ratu, utawa olèh santana putrane wong gèdhe tédhaking karaton, awit bakal dadi sêsêmbahane wong akèh.” (SP/6)

“Apakah kamu belum memahami bahwa anak raja tidak boleh menikah dengan orang biasa? Ia harus menikah dengan putri raja, atau dengan kerabat anak dari pejabat atau bangsawan besar yang masih dekat dengan keraton, karena ia kelak akan menjadi panutan dan penghormatan banyak orang.” (SP/6)

Dalam perspektif antropologi sastra Karin Barber, kutipan tersebut tidak hanya menunjukkan aturan pernikahan di lingkungan keraton, tetapi juga berfungsi sebagai tindakan sosial yang mempertegas

batas antara bangsawan dan rakyat biasa. Larangan agar anak raja tidak menikah dengan “orang kecil” menjadi cara Ki Padmasusastra menggambarkan bahwa keraton adalah kelompok yang tertutup dan eksklusif. Pernyataan bahwa anak raja “harus menikah dengan putri raja atau bangsawan besar” menunjukkan bahwa teks ini ikut membentuk pandangan bahwa status bangsawan adalah sesuatu yang sakral dan tidak boleh tercampur dengan kalangan biasa. Dengan demikian, Serat Prabangkara tidak hanya menggambarkan adanya perbedaan kelas, tetapi juga secara aktif menciptakan jarak sosial agar wibawa keraton tetap terjaga.

Fungsi sosial dari penggambaran ini sangat penting dalam budaya Jawa, yaitu untuk memperkuat legitimasi kekuasaan. Ungkapan bahwa seorang anak raja akan menjadi “panutan banyak orang” menegaskan bahwa pasangan bangsawan harus berasal dari lingkungan yang dianggap setara agar kehormatan mereka tetap tinggi. Teks ini mengajarkan bahwa kewibawaan seorang pemimpin tidak hanya berasal dari dirinya sendiri, tetapi juga dari citra sosial yang melekat padanya. Karena itu, Serat Prabangkara ikut membentuk cara pandang masyarakat agar menerima hierarki sosial sebagai sesuatu yang wajar dan perlu dijaga. Dengan kata lain, teks ini membantu mempertahankan tatanan keraton dengan menekankan pentingnya kemurnian status dalam kehidupan bangsawan.

Konsep Bibit, Bebet, Bobot dalam Dinamika Sosial Pernikahan

Dalam budaya Jawa, *bibit* ‘asal-usul’, *bebet* ‘status sosial’, dan *bobot* ‘kualitas diri’ merupakan tiga prinsip penting yang digunakan untuk menilai kelayakan pasangan. Ketiga konsep ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman keluarga, tetapi juga sebagai mekanisme sosial untuk menjaga kehormatan dan kedudukan suatu kelompok masyarakat.

Dalam *Serat Prabangkara*, ideologi ini juga diterapkan sebagai alat untuk

mempertahankan posisi bangsawan. Pernikahan tidak digambarkan sebagai urusan pribadi, tetapi sebagai strategi politik untuk menguatkan hubungan antarelite dan melindungi wibawa keraton. Dari sudut pandang antropologi sastra, teks ini menegaskan bahwa martabat raja hanya dapat dipertahankan jika ia menikah dengan seseorang yang setara dalam garis keturunan dan status sosial. Karena itu, pernikahan menjadi bagian penting dalam menjaga citra penguasa di mata masyarakat.

Pernikahan sebagai Alat Politik

Pernikahan pada dasarnya adalah ikatan cinta dan penyatuan dua keluarga, tetapi dalam banyak konteks budaya termasuk tradisi kerajaan di Jawa, pernikahan juga berfungsi sebagai strategi politik untuk memperkuat kekuasaan, membangun aliansi, atau menjaga stabilitas antarwilayah. Pernikahan politik seperti dilakukan untuk menyatukan dua kerajaan melalui hubungan kekerabatan, meski sering kali tidak dilandasi cinta sehingga berpotensi menimbulkan konflik. Dalam Serat Prabangkara, misalnya, meskipun Prabangkara hanya mencintai Rara Apyu, Prabu Andakara tetap ingin menikahkannya dengan putri kerajaan lain demi memperkuat hubungan antarkerajaan dan menjaga garis keturunan bangsawan. Hal ini dapat ditemukan dalam cuplikan SP berikut.

“He, kakang patih, karsaningsun anuhoni janji kang wus ingsun dhawuhake marang yayi Pangeran Andapawaka, anake wulanjar ingsun pundhut mantu olèh kaki adipati, sarta ingsun karsa anêtipi kautamaning ratu, panuwune yayi pangeran, nyuwun winiwaha ing pasamuwan gédhe, ingsun iya amituruti,” (SP/87-88)

“Hei, kakang patih, keinginanku menepati janji yang sudah aku katakan kepada adikku Pangeran Andapawaka, anaknya aku ambil mantu oleh kaki adipati, dan aku ingin menjaga arti penting raja, permintaanku pangeran, aku meminta pertemuan pengantin di pertemuan yang besar, saya akan melakukannya,” (SP/87-88)

Dari kutipan Serat Prabangkara tersebut, dapat dipahami bahwa menurut perspektif Karin Barber yang melihat teks sebagai sebuah tindakan sosial, dialog Prabu Andakara tidak hanya berfungsi menggerakkan jalan cerita. Dialog itu juga dipakai sebagai cara untuk menegaskan bahwa pernikahan dalam lingkungan keraton adalah alat untuk menjaga kestabilan politik. Penyebutan tentang kewajiban “menepati janji” kepada sesama bangsawan (Pangeran Andapawaka) sengaja ditampilkan pengarang untuk menguatkan ideologi bahwa hubungan kekuasaan antarelite lebih penting daripada kebebasan pribadi. Teks ini melakukan “kerja sosial” dengan menanamkan nilai bahwa kehormatan seorang raja terlihat dari kepatuhannya pada perjanjian politik yang dibungkus sebagai hubungan keluarga. Dengan begitu, Serat Prabangkara ikut berperan menjaga struktur feodal, mengajarkan bahwa kesesuaian status sosial dianggap syarat utama agar jaringan kekuasaan di istana tetap stabil dan tidak terguncang.

Lebih jauh, dari data tersebut juga dapat disimpulkan bahwa fungsi budaya yang dijalankan oleh teks adalah untuk mereproduksi dan melestarikan konsep “kewibawaan” (*authority*) melalui politik. Frasa “ingin menjaga arti penting raja” yang diikuti dengan instruksi menggelar “pertemuan besar” menunjukkan bahwa teks ini berperan sebagai penjaga standar simbolik seorang priyayi, yang menegaskan bahwa kualitas seorang pemimpin harus divalidasi melalui ritual publik yang megah. Teks tidak hanya menggambarkan pesta, tetapi juga berfungsi menjaga persepsi masyarakat Jawa bahwa legitimasi kekuasaan bersifat performatif dan harus dipentaskan dengan dilihat orang banyak. Melalui narasi ini, teks menjaga pandangan bahwa kemewahan ritual pernikahan bukan sekadar perayaan, melainkan panggung politik yang krusial untuk memamerkan dominasi kelas penguasa dan membedakannya secara visual dari rakyat biasa.

Pernikahan sebagai Upaya Mempertahankan Trah

Setelah prinsip bibit, bebet, dan bobot dijelaskan sebagai dasar dalam memilih pasangan, Serat Prabangkara juga menunjukkan bagaimana pernikahan dipakai sebagai cara untuk menjaga kemurnian trah atau garis keturunan. Dalam pandangan sosial Jawa yang tampak dalam teks ini, memilih pasangan bukan hanya urusan pribadi, melainkan juga dianggap bisa memengaruhi kehormatan dan kedudukan keluarga. Karena itu, menikah dengan pasangan yang setara dipandang sebagai tindakan yang benar, sementara memilih pasangan dari kalangan rakyat biasa dianggap membawa malu dan merusak wibawa keluarga. Pandangan ini tergambar jelas melalui kemarahan Prabu Brawijaya ketika mengetahui pilihan putranya, seperti terlihat pada kutipan berikut.

“Wangkote anakira: ora mung lumuh pinalakramakake bae, malah duwe karêp dhewe, moh ngambah dalam kang marang kautaman, milih ngambah dalam kang marang kanisthan, arêp apèk bocah anake wong pidakpadarakan abdiningsun jurutaman ing sriwadari aran Rara Apyu ginawe swami, saiba loking jana ilanging kautamaningsun, dene putraningsun kang insun gadhang gumanti kapraboningsun pramèswarine wong pidakpadarakan. Mungguh wangkote anakira insun pasrahake marang sira, nganti sapiturute, yèn wis kèlakon sira paripih, apa ature anakira, sira nuli angunjukana uninga marang panjênengan insun.” (SP/9)

“Betapa buruknya kelakuan anakku! Tidak hanya menolak dinikahkan, ia bahkan memiliki keinginan sendiri. Ia tidak mau berjalan di jalan kemuliaan, tetapi memilih jalan kehinaan. Ia ingin memperistri gadis dari kalangan rakyat biasa, anak wanita abdi kerajaan bernama Rara Apyu. Jika hal itu terjadi, hilanglah kewibawaanku. Bagaimana mungkin putraku, yang kuharap menggantikanku sebagai raja, memilih permaisuri dari kalangan bawahan?” (SP/9)

Dari kutipan tersebut terlihat bahwa teks tidak hanya tentang “tindakan sosial” yang menggambarkan konflik antara ayah dan anak, tetapi juga membentuk cara pandang masyarakat tentang aturan memilih pasangan. Serat Prabangkara menegaskan bahwa menikah dengan pasangan yang setara merupakan suatu wujud “jalan kemuliaan”, sedangkan memilih pasangan dari rakyat biasa dianggap sebagai “jalan kehinaan”. Sikap ini menunjukkan bahwa teks berusaha menolak perpindahan status sosial melalui pernikahan dan memberi cap buruk pada pilihan yang menentang aturan kelas. Penyebutan Rara Apyu sebagai “kalangan bawahan” digunakan untuk menegaskan bahwa masuknya orang kelas bawah ke lingkungan keluarga raja dianggap merusak kehormatan dan kemurnian trah.

Ungkapan Prabu Andakara, seperti “hilanglah kewibawaanku,” menunjukkan bahwa legitimasi seorang pemimpin dalam budaya Jawa digambarkan sangat bergantung pada kemurnian garis keturunan. Teks menanamkan gagasan bahwa wibawa seorang calon raja dapat runtuh, salah satunya hanya karena keturunannya salah memilih pasangan. Dengan demikian, Serat Prabangkara menjalankan fungsi sosial untuk mempertahankan pandangan bahwa jabatan dan kehormatan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan individu, tetapi juga oleh kepatuhan menjaga jarak sosial dari golongan *wong cilik*, yaitu perbedaan kasta.

Dari dinamika pernikahan di atas, terlihat bahwa prinsip Jawa tentang bibit, bebet, bobot sangat penting dipertimbangkan dalam memilih pasangan. Walaupun pada masa lalu prinsip ini sering dikaitkan dengan feodalisme, jika dilihat lebih jauh, nilai-nilai tersebut masih relevan hingga sekarang sebagai dasar menjaga keharmonisan sosial. Dalam pandangan antropologi sastra Karin Barber, Serat Prabangkara tidak hanya mencatat aturan itu, tetapi juga menjalankan “tindakan sosial” dengan mengubah prinsip tersebut menjadi alat untuk mempertahankan budaya.

Teks ini menunjukkan bahwa pernikahan memiliki dua fungsi: sebagai sarana politik untuk memperkuat kekuasaan dan sebagai cara menjaga kemurnian garis keturunan agar status keluarga kerajaan tidak turun. Karena itu, Serat Prabangkara tidak hanya menggambarkan kehidupan masa lalu, tetapi juga berperan menanamkan pandangan bahwa memilih pasangan yang setara statusnya adalah hal penting bukan hanya demi kekuasaan semata, melainkan juga untuk menjaga kestabilan dan keteraturan sosial.

Penggambaran Konflik antara Keinginan Tokoh dan Aturan Sosial

Walaupun Serat Prabangkara banyak menekankan pentingnya menjaga hierarki sosial, teks ini juga menjadi ruang yang memperlihatkan benturan antara keinginan pribadi tokoh dan aturan sosial yang membatasi. Dalam kacamata antropologi sastra, narasi ini tidak hanya menggambarkan kepatuhan, tetapi juga menunjukkan adanya perlawanan terhadap kekuasaan raja. Teks menghadirkan ketegangan antara aturan adat keraton yang dianggap mutlak dengan keyakinan religius tokohnya. Pada bagian ini, pengarang menampilkan ajaran agama sebagai bentuk penolakan terhadap kehendak orang tua, sekaligus menegaskan bahwa suara hati dapat memiliki kedudukan lebih tinggi daripada perintah penguasa, seperti terlihat dalam kutipan berikut.

“.....Sanadyan ratu botên wênang amêksa dhatêng tiyang ingkang lumuh: utawi botên ajêng, upami kalampahan karsaning ratu ingkang makatên wau, punika nyulayani kalayan pranataning agama, prasasat mêksa akèn nêdha têtêdhan ingkang dipun gironi, sanadyan ratu wau têtayang sêpuhipun inggih ugi botên kenging dening amung dados jalaran, têtêp gêsanging manungsa mocung piyambak-piyambak ing pangayunanipun Pangeran” (SP/6-7)”

“.....Meskipun raja memiliki kekuasaan, keinginan tersebut tidak sesuai dengan

aturan agama. Ia mengibaratkan paksaan itu seperti memaksa seseorang untuk memakan kembali makanan yang telah dimuntahkan. Meskipun raja adalah orang tua kandungnya, pangeran menegaskan bahwa hidup manusia tetap berada di bawah kekuasaan Tuhan.” (SP/6-7)”

Melalui kutipan tersebut, Serat Prabangkara sebenarnya sedang menunjukkan tindakan sosial yang cukup berani dalam budaya Jawa yang feodal. Teks ini tidak hanya menampilkan dialog penolakan, tetapi juga menggugat konsep kepatuhan mutlak seorang anak kepada raja atau orang tua. Dengan menegaskan bahwa “hidup manusia berada dalam kuasa Tuhan,” narasi ini mencoba menempatkan aturan agama sebagai sesuatu yang lebih tinggi daripada aturan adat keraton. Dalam pandangan antropologi sastra, bagian ini berfungsi untuk membatasi kekuasaan raja yang selama ini dianggap absolut. Teks menegaskan bahwa perintah penguasa tidak lagi sah jika bertentangan dengan nilai moral dan ajaran agama. Karena itu, Serat Prabangkara menjadi ruang kritik yang aman, yang menyampaikan bahwa kesetiaan kepada Tuhan bisa menjadi alasan yang dibenarkan untuk menolak perintah yang tidak adil.

Penggunaan metafora “memakan kembali makanan yang telah dimuntahkan” tidak hanya berfungsi sebagai bentuk penolakan, tetapi juga sebagai cara budaya untuk menandai bahwa pemaksaan kehendak raja adalah tindakan yang kotor dan tidak etis. Narasi ini mengajarkan bahwa kehormatan diri tidak selalu muncul dari kepatuhan pada atasan, tetapi dari keberanian memegang prinsip kebenaran agama. Namun, Serat Prabangkara juga menunjukkan dinamika sosial yang lebih rumit. Ketika sang Pangeran memakai agama sebagai dasar untuk melawan tekanan feodal, tokoh perempuan justru digambarkan sebagai sosok yang meredam keinginan pribadinya demi menjaga ketertiban sosial. Di titik ini, teks menegosiasikan ulang bentuk perlawanan: tindakan individu

dibatasi oleh kesadaran akan dampak sosial yang lebih besar, seperti munculnya aib (wirang) dan rusaknya garis keturunan. Sikap ini terlihat jelas dalam ungkapan pengorbanan Rara Apyu berikut ini.

“...Aku ora abot labuh pati tinimbang kowe mrêngkang saka wisesaning wong atuwatuwamu kang nyimpang saka pranataning agama, awit kowe bakal tumiba ing nistha sarta koncatan sih dening anjurungi karêpmu kang ingaran ora bêner sarta anglêlingsêmi utawa anggêgawa marang sanak sadulurmu, apadene bakal angilangake kaurmataning turunmu...” (SP/27)

“...Aku tidak keberatan mati daripada kamu melanggar nasihat orang tuamu yang menyimpang dari aturan agama. Sebab, jika kamu mengabaikannya, kamu bisa jatuh pada kehinaan dan kehilangan kasih sayang karena menuruti keinginan yang dianggap tidak benar, serta dapat menyusahkan atau membawa malu bagi sanak saudaramu. Bahkan hal itu bisa menghilangkan kehormatan keturunanmu...” (SP/27)

Melalui kutipan tersebut, Serat Prabangkara menampilkan strategi penting: tokoh yang dirugikan, Rara Apyu, justru dijadikan suara yang mendukung aturan sosial yang menindas dirinya. Dengan menggambarkan kesediaannya untuk mati demi mencegah kekasihnya melanggar perintah orang tua dan aturan agama, teks ini menanamkan nilai kepatuhan yang kuat. Dalam perspektif Karin Barber, pengarang tidak hanya menggambarkan putus asa seorang perempuan, tetapi juga memakai dialog ini sebagai alat kontrol sosial agar tidak muncul perlawanan terhadap hierarki. Pesan konservatif yang diletakkan pada tokoh dari kalangan bawah membuat ketimpangan sosial tampak wajar dan diterima.

Penekanan pada “rasa malu” dan “kehormatan keturunan” juga berfungsi sebagai mekanisme pendisiplinan. Teks menunjukkan bahwa pelanggaran aturan

pernikahan bukan hanya kesalahan pribadi, melainkan membawa aib bagi seluruh keluarga. Dengan demikian, Serat Prabangkara memperkuat budaya malu dalam masyarakat Jawa, menegaskan bahwa menjaga nama baik lebih penting daripada kepentingan individu. Narasi ini memagari perilaku masyarakat agar tetap sesuai adat, sekaligus mengingatkan bahwa aib dan pengucilan adalah konsekuensi sosial yang lebih ditakuti daripada kematian itu sendiri.

Sebagai penutup, konflik antara keinginan tokoh dan aturan sosial dalam Serat Prabangkara bukan hanya kisah cinta, melainkan arena negosiasi nilai. Dengan perspektif Karin Barber, teks ini bekerja ganda: Pangeran diberi ruang untuk melawan kekuasaan raja dengan dalil agama, tetapi segera “diluruskan” oleh Rara Apyu yang menegaskan pentingnya patuh pada adat demi menjaga ketertiban sosial. Pola ini menunjukkan bahwa Serat Prabangkara berfungsi menjembatani ketegangan antara kehendak individu dan struktur sosial yang kaku. Pada akhirnya, teks menegaskan ide besar budaya Jawa: keinginan pribadi tetap harus tunduk demi menjaga harmoni bersama dan kelestarian hierarki sosial.

SIMPULAN

Penelitian berjudul “Representasi Konsep Bibit, Bebet, Bobot dalam Memilih Pasangan dan Konflik Status Sosial dalam Serat Prabangkara: Kajian Antropologi Karin Barber” menyimpulkan bahwa SP bukan sekadar karya sastra estetik, melainkan juga dokumen budaya yang mencerminkan sekaligus membentuk dinamika sosial masyarakat Jawa. Dengan menggunakan perspektif antropologi sastra Karin Barber, naskah ini terlihat menjalankan fungsi sebagai “tindakan sosial” yang menegaskan batas tegas antara bangsawan dan rakyat biasa. Penolakan pernikahan serta kuatnya ideologi bibit, bebet, bobot memperlihatkan bahwa Ki Padmasusastra tidak hanya menulis cerita cinta, tetapi juga memakai sastra sebagai alat untuk menjaga kemurnian trah dan membatasi mobilitas sosial.

Temuan ini mengoreksi pandangan lama dan menegaskan bahwa karya sastra Jawa klasik dapat berfungsi sebagai alat politik yang membantu mempertahankan kekuasaan dan menormalkan ketimpangan sosial.

Hasil kajian memperlihatkan bahwa SP memiliki fungsi sebagai *social action* 'tindakan sosial' dan bukti etnografis yang penting dalam memahami pandangan dunia masyarakat Jawa. Selain itu, SP juga bekerja sebagai mediator budaya yang menengahi ketegangan antara keinginan individu dan aturan sosial yang ketat. Meskipun teks memberi ruang bagi tokoh yang menggunakan ajaran agama untuk menentang kehendak raja, narasi akhirnya kembali menguatkan tatanan feodal melalui tekanan budaya malu (wirang) dan pentingnya citra keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa dalam budaya Jawa, pernikahan bukan sekadar urusan pribadi, melainkan bagian penting dari kelangsungan kehormatan dan kekuasaan. Dengan demikian, teks ini tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai sarana untuk membentuk kesadaran masyarakat bahwa kepentingan pribadi harus disesuaikan dengan stabilitas sosial dan kehormatan garis keturunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajrin, S. (2017). Kebahagiaan Perkawinan Isteri dalam Konsep Perempuan Ideal Jawa. *Kafa`ah: Journal of Gender Studies*, 7(1), 26. <https://doi.org/10.15548/jk.v7i1.167>
- Anarbuka Kukuh Prabawa, M. M. (2022). INTERPRETASI MAKNA GRAMATIS DAN PSIKOLOGIS TEMBANG MACAPAT DENGAN ANALISIS HERMENEUTIKA SCHLEIERMACHER. *INDONESIAN JOURNAL of Performing Arts Education*, 2(2).
- Aziz, S. (2017). TRADISI PERNIKAHAN ADAT JAWA KERATON MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH. *Jurnal Kajian Islam Dan Budaya*, 15(1), 22–41.
- Barber, K. (2007). *The Anthropology Of Texts Persons and Publics*. New York: United States of America by Cambridge University Press.
- Gigih, M. A., Adha, M. M., & Suntoro, I. (2021). EKSISTENSI PERKAWINAN ADAT JAWA DI DESA KALIBALANGAN KECAMATAN ABUNG SELATAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA. *Jurnal PEKAN*, 6(November), 201–213.
- Khoiruddin, D., Syamsuddin, & Baehaqi. (2024). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP METODE BIBIT BEBET □. 1(1), 6–13.
- Pamungkas, O. Y. (2017). Serat Prabangkara Karya Ki Padmasusastra Tinjauan Psikologi Sastra Dan Nilai Pendidikan Karakter. *Academy of Education Journal*, 8(1), 9–26. <https://doi.org/10.47200/aoej.v8i1.332>
- Pamungkas, O. Y. (2021). Sastra Cyber Abad Ke-20: Sebuah Tinjauan Tentang Nilai Penguatan Karakter Etis Lingkungan. *RUANG KATA: Journal of Language and Literature Studies*, 1(01), 1–10. <https://doi.org/10.53863/jrk.v1i01.192>
- States of America by Cambridge University Press.
- Ajrin, S. (2017). Kebahagiaan Perkawinan Isteri dalam Konsep Perempuan Ideal Jawa. *Kafa`ah: Journal of Gender Studies*, 7(1), 26. <https://doi.org/10.15548/jk.v7i1.167>

- Ajrin, S. (2017). Kebahagiaan Perkawinan Isteri dalam Konsep Perempuan Ideal Jawa. *Kafa`ah: Journal of Gender Studies*, 7(1), 26. <https://doi.org/10.15548/jk.v7i1.167>
- Anarbuka Kukuh Prabawa, M. M. (2022). INTERPRETASI MAKNA GRAMATIS DAN PSIKOLOGIS TEMBANG MACAPAT DENGAN ANALISIS HERMENEUTIKA SCHLEIERMACHER. *INDONESIAN JOURNAL of Performing Arts Education*, 2(2).
- Aziz, S. (2017). TRADISI PERNIKAHAN ADAT JAWA KERATON MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH. *Jurnal Kajian Islam Dan Budaya*, 15(1), 22–41.
- Barber, K. (2007). *The Anthropology of Texts Persons and Publics*. New York: United States of America by Cambridge University Press.
- Gigih, M. A., Adha, M. M., & Suntoro, I. (2021). EKSISTENSI PERKAWINAN ADAT JAWA DI DESA KALIBALANGAN KECAMATAN ABUNG SELATAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA. *Jurnal PEKAN*, 6(November), 201–213.
- Khoiruddin, D., Syamsuddin, & Baehaqi. (2024). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP METODE BIBIT BEBET □. 1(1), 6–13.
- Pamungkas, O. Y. (2017). Serat Prabangkara Karya Ki Padmasusastra Tinjauan Psikologi Sastra Dan Nilai Pendidikan Karakter. *Academy of Education Journal*, 8(1), 9–26. <https://doi.org/10.47200/aoej.v8i1.332>
- Pamungkas, O. Y. (2021). Sastra Cyber Abad Ke-20: Sebuah Tinjauan Tentang Nilai Penguatan Karakter Etis Lingkungan. *RUANG KATA: Journal of Language and Literature Studies*, 1(01), 1–10. <https://doi.org/10.53863/jrk.v1i01.192>
- Permatasari, A. F., & Wijaya, M. (2018). Perubahan Perilaku Masyarakat Jawa Dalam Penyelenggaraan Resepsi Pernikahan Di Kota Surakarta. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 6(1). <https://doi.org/10.20961/jas.v6i1.18134>
- Uyun, N. (2023). Membaca Mitos dan Tradisi dalam Konflik Perkawinan Beda Etnis. *Jurnal POPULIKA*, 11(1), 23–33.
- Wibowo, P. A. W. (2016). Pandangan Multikultural Ki Padmasusastra Melalui Empat Karya Sastranya. *Jurnal IKADBUDI: Jurnal Ilmiah, Bahasa, Sastra, Dan Budaya Daerah*, 5(12).